

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Tahun 2025.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025 bagi para pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kegiatan Pembangunan Bidang Sosial sebagai tahapan kegiatan dalam kerangka mewujudkan Visi Kabupaten Mojokerto yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”***.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Mojokerto, Januari 2025


TRY RAHARJO MURDIANTO, S.STP., M.AP.
Pembina
NIP 198705192006021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum 3

 1.3 Maksud dan Tujuan 6

 1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 8

 2.1 Evaluasi Renja PD Tahun 2024 dan
 Capaian Renstra PD 8

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD..... 32

 2.3 Isu-isu Penting..... 38

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal PD 39

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.. 84

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN..... 86

 3.1 Visi dan Misi 86

 3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 87

 3.3 Tujuan dan Sasaran 87

 3.4 Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan90

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN104

BAB V. PENUTUP.....130

Lampiran- lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ini mengacu pada Rencana Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan sub. kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan perumusan program, kegiatan, sub. Kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sedangkan Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun ke dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program, kegiatan serta sub. kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja

Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas pada forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program, kegiatan dan sub. kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program, kegiatan dan sub. kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub. kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyelarasan program, kegiatan dan sub. kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, penyesuaian pendanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

Sebagai dokumen perencanaan, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program kerja prioritas, kegiatan pembangunan, sub kegiatan beserta pendanaannya sehingga tercipta keselarasan dalam rangka pembangunan Daerah. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi organisasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip :

1. Mengacu pada Rancangan Akhir Perangkat Daerah tahun yang bersangkutan, yang digunakan untuk merumuskan program, kegiatan, sub. Kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif;
2. Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penetapan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju tahun berikutnya;
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan periode sebelumnya sebagai landasan perumusan kegiatan alternative untuk mencapai sasaran

Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;

4. Sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dapat menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Mojokerto juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal pembentukan Kabupaten Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
25. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektotorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1).
43. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026;
44. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Srtategik (RENSTRA) Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir Renja PD) adalah sebagai berikut :

Maksud

- a. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program, kegiatan dan sub. kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

Tujuan

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah.

- c. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
- e. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan rencana kerja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

RPJMD		Renstra	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berdimensi Kerakyatan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mempunyai kinerja lainnya yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (Nilai)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10 %
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)

2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3
---	---	---	---

Dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto didukung oleh 6 (enam) program 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh) sub kegiatan.

Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 5 (lima) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan;
2. Program Pemberdayaan Sosial, dengan 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan;
3. Program Rehabilitasi Sosial, dengan 2 (dua) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan;
5. Program Penanganan Bencana, dengan 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan Tahun 2024, yang terdiri dari 6 program 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan hasil capaian realisasi anggaran sebesar 94,83%, dan capaian kinerja sebesar 103,50%.

Capaian Renstra Dinas Sosial pada Tahun 2024 pada umumnya tercapai, adapun capaian program dan kegiatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV berdasarkan realisasi kinerja dan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1 : **“Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)”** dengan indikator

kinerja ***Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar***, Tahun 2024 target sasaran 91% terealisasi sebesar 97,97 dan tingkat capaian sebesar 107,66%.

Perhitungan rata-rata capaian sebesar 97,97 diperoleh dari formulasi Jumlah penerima bantuan sosial dan layanan sosial dibagi DTKS kali 100%.

Sedangkan untuk anggaran yang mendukung indikator kinerja utama sebesar Rp. 9.973.299.600,00 dan terserap sebesar Rp. 9.801.575.525,00 atau 98,28%.

2. Kinerja lainnya yaitu 1 : ***“Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel”*** dengan indikator kinerja :

- 1) ***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***, realisasi Tahun 2024 sebesar 81,10 (A) dan tingkat capaiannya sebesar 100,12% dari target 81. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat.
- 2) ***Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah***, realisasi Tahun 2024 sebesar 94,83% dan tingkat capaiannya sebesar 98,68% dari target 96,10%. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Dinas Sosial.
- 3) ***Indeks Profesionalitas ASN***, realisasi Tahun 2024 sebesar 79,72% dan tingkat capaiannya sebesar 97,22% dari target 82. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari BKPSDM.

Kinerja lainnya yaitu 2 : ***“Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah”*** dengan indikator ***Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan***, realisasi Tahun 2024 sebanyak 3 dan tingkat capaiannya sebesar 100%. Berdasarkan Laporan Inovasi Dinas Sosial.

Sedangkan untuk anggaran yang mendukung indikator kinerja lainnya sebesar Rp. 5.446.607.390,00 dan terserap sebesar Rp. 4.821.534.919,00 atau 88,52%.

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

1.) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai, dengan realisasi anggaran sebesar 88,52% dan capaian kinerja 99,74%.

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target, anggaran terealisasi 85,15% dan capaian kinerja 100%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran terealisasi 84,43% dengan capaian kinerja 100%.

- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran terealisasi 85,85% dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan :

- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, anggaran terealisasi 87,50% dan capaian kinerja 98,68%.

Sub. Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran terealisasi 87,50% dengan capaian kinerja 98,68%.

Kegiatan :

- c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan, anggaran terealisasi 95,76% dan capaian kinerja 100%.

Sub. Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, anggaran terealisasi 94,76% dengan capaian kinerja 100%.

2) Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, anggaran terealisasi 97,59% dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan :

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan anggaran terealisasi 99,01% dan capaian kinerja 100%.

Sub. Kegiatan :

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, anggaran terealisasi 90,27% dengan capaian kinerja 100%.

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, anggaran terealisasi 96,00% dengan capaian kinerja 100%.

3) Penyediaan Bahan/Material

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material adalah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, anggaran terealisasi 76,60% dengan capaian kinerja 100%.

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, anggaran terealisasi 98,69% dengan capaian kinerja 100%.

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran terealisasi 98,52% dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan :

e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik, anggaran terealisasi 94,41% dan capaian kinerja 100%

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, anggaran terealisasi 95,55% dengan capaian kinerja 100%.

- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, anggaran terealisasi 92,09% dengan capaian kinerja 100%.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersebut digunakan untuk mendukung kinerja lainnya pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan.

Dengan anggaran Rp. 5.446.607.390,00 dan terserap sebesar Rp. 4.821.534.919,00 atau 88,52% dengan capaian kinerja 99,74%.

2.) Program Pemberdayaan Sosial

Pencapaian kinerja program pemberdayaan sosial adalah Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan realisasi anggaran sebesar 93,10% dan capaian kinerja 100%.

Kegiatan :

- a) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi, anggaran terealisasi 93,10% dan capaian kinerja 100%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 96,52% dengan capaian kinerja 100%;

- 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 99,88% dengan capaian kinerja 100%;

- 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota, anggaran terealisasi 91,34% dengan capaian kinerja 100%.

Pada Program Pemberdayaan Sosial tersebut digunakan untuk pemberdayaan/pembinaan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Lembaga yang terdiri dari Katar 304, LKS 45 (LKSA 41, LKSU 3, LKS ODGJ 1). Dengan total anggaran Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp. 544.677.600,00 terserap Rp. 507.092.900,00 atau 93,10% dengan capaian kinerja 100%.

3.) Program Rehabilitasi Sosial

Pencapaian kinerja program rehabilitasi sosial adalah Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial, dengan anggaran tersealisasi 96,30% dan capaian kinerja 100%.

Kegiatan:

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi, anggaran terealisasi 96,75% dan capaian kinerja 100%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyediaan Permakanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Permakanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 97,86% dengan capaian kinerja 100%;

2) Penyediaan Sandang

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Sandang adalah Jumlah Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 93,84% dengan capaian kinerja 100%;

3) Penyediaan Alat Bantu

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 93,12% dengan capaian kinerja 100%;

4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 100,00% dengan capaian kinerja 100%;

5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 99,23% dengan capaian kinerja 100%;

6) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat adalah Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 88,54% dengan capaian kinerja 100%;

- 7) Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak adalah Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 96,54% dengan capaian kinerja 100%;

- 8) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 97,84% dengan capaian kinerja 100%;

- 9) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 98,04% dengan capaian kinerja 100%;

- 10) Pemberian Layanan Kedaruratan

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 98,74% dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan:

- b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi, anggaran terealisasi 91,58% dan capaian kinerja 100%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyediaan Permakanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Permakanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 91,58% dengan capaian kinerja 100%.

Pada Program Rehabilitasi Sosial tersebut digunakan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program Rehabilitasi Sosial ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Yang mana pada kegiatan pertama ada 10 (sepuluh) sub kegiatan sedangkan pada kegiatan kedua ada 1 (satu) sub kegiatan.

Dengan total anggaran Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp. 1.725.190.300,00 terserap Rp. 1.661.350.375,00 atau 96,30% dengan capaian kinerja 100%.

4.) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pencapaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan anggaran terealisasi 99,18% dan capaian kinerja 100%.

Kegiatan :

- a) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah data fakir miskin yang dikelola, anggaran terealisasi 99,18% dan capaian kinerja 100%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 86,99% dengan capaian kinerja 100%;

- 2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pencapaian indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota, terealisasi 99,39% dengan capaian kinerja 100%;

- 3) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota, terealisasi 96,26% dengan capaian kinerja 100%.

Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut digunakan untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Tujuan DBHCHT adalah: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mendukung kesehatan, Pengembangan ekonomi, Pengawasan produksi dan peredaran tembakau. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Dengan total anggaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 7.598.831.700,00 terserap Rp. 7.536.213.500,00 atau 99,18% dengan capaian kinerja 100%.

Anggaran Rp. 7.598.831.700,- tersebut digunakan untuk :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. DBHCHT | : Rp. 7,164,456,150,- |
| 2. PKH | : Rp. 160.700.000,- |
| 3. SEMBAKO/BPNT | : Rp. 16.645.000,- |
| 4. Pendataan DTKS | : Rp. 78.470.250,- |
| 5. Pendataan PMKS-PSKS | : Rp. 10.929.750,- |
| 6. PKH Banmas | : Rp. 167.630.550,- |

5.) Program Penanganan Bencana

Pencapaian kinerja Program Penanganan Bencana adalah Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial, dengan anggaran terealisasi 92,65% dan capaian kinerja 100%.

Kegiatan :

- a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 90,75% dan capaian kinerja 100%.

Sub. Kegiatan :

1) Penyediaan Makanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Makanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 89,22% dengan capaian kinerja 100%;

2) Penyediaan Sandang

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Sandang adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 93,70% dengan capaian kinerja 100%;

3) Pelayanan Dukungan Psikososial

Indikator kinerja sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial adalah Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota, anggaran terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan :

b) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Tagana yang dibina, anggaran terealisasi 93,68% dan capaian kineerja 100%.

Sub. Kegiatan :

1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana adalah Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, anggaran terealisasi 93,68% dengan capaian kinerja 100%.

Pada Program Penanganan Bencana tersebut digunakan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program Penanganan Bencana ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. Tujuan dari Program Penanganan Bencana adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, mengurangi resiko bencana, dan meminimalkan dampak bencana. Yang mana pada pada program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Kegiatan pertama ada 3 (tiga) sub kegiatan sedangkan pada kegiatan kedua ada 1 (satu) sub kegiatan.

Dengan total anggaran Program Penanganan Bencana sebesar Rp. 90.000.000,00 terserap Rp. 82.843.750,00 atau 92,65% dengan capaian kinerja 100%.

6.) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pencapaian kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola, dengan anggaran terealisasi 96,40% dan capaian kinerja 100%.

Kegiatan :

- a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 96,40% dan capaian kinerja 100%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)

Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 96,40% dengan capaian kinerja 100%.

Pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan tersebut bertujuan untuk memelihara Taman Makam Pahlawan. Pada program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Dengan total anggaran Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar Rp. 14.600.000,00 terserap Rp. 14.075.000,00 atau 96,40% dengan capaian kinerja 100%.

Total anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 15.419.906.990,00 terealisasi sebesar Rp. 14.623.110.444,00 atau 94,83% dengan capaian kinerja 103,50%.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran sampai dengan Triwulan IV sebagaimana tersebut Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
LAPORAN EVALUASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

N O	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKT U PELAK SA NAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALA HAN
			TARGET / SATUAN	REALISA SI	CAPAI AN (%)	TARGET	REALIS ASI	CAPAI AN		ALOKASI	REALISASI	CAPAI AN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,00	81,10	100,12								
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10	94,83	98,68								

		Indeks Profesionalitas ASN	82,00	79,72	97,22								
	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	3	3	100,00								
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	90	90	100,00				Okt - Des	5.446.607.390	4.821.534.919	88,52	
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	90	90	100,00					18.300.000	15.583.050	85,15	

	1.	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2	100,00					9.025.000	7.620.050	84,43	
	2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6	100,00					9.275.000	7.963.000	85,85	
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10	94,83	98,68					4.548.488.000	3.979.753.656	87,50	
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bln	12	100,00					4.548.488.000	3.979.753.656	87,50	

	3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	88	88	100,00					268.258.100	244.141.300	91,01	
	1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12	100,00					96.493.200	87.106.000	90,27	
	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12	100,00					50.000.000	48.000.000	96,00	
	3.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12	100,00					50.000.000	38.298.300	76,60	

	4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12	100,00					19.906.900	19.647.000	98,69	
	5.	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12	100,00					51.858.000	51.090.000	98,52	
	4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	88	88	100,00					347.595.840	332.852.113	95,76	
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	100,00					225.000.000	213.211.855	94,76	

	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	100,00					122.595.840	119.640.258	97,59	
	5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90	90	100,00					263.965.450	249.204.800	94,41	
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17	100,00					177.113.200	169.226.100	95,55	

	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8	100,00					86.852.250	79.978.700	92,09	
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	91	97,97	107,66								

2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75	75	100,00	38 Orang 349 Lembag a	38 Orang 349 Lembag a	100,0 0 100,0 0	Okt - Des	544.677.600	507.092.900	93,10	
1.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi	20 Orang 18 18 Orang 349 349	20 18 18 349	100,00 100,00 100,00	20 18 349	20 18 349	100,0 0 100,0 0 100,0 0		544.677.600	507.092.900	93,10	

			Lembaga										
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20	100,00	20	20	100,00		3.975.000	3.836.600	96,52	
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	18	100,00	18	18	100,00		109.866.600	109.740.000	99,88	

	3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	349 Lembaga	349	100,00	349	349	100,00		430.836.000	393.516.300	91,34	
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	55	55	100,00	7.181.440 Keluarga 96 Orang	7.181.440 Keluarga 96 Orang	100,00 100,00	Okt - Des	7.598.831.700	7.536.213.500	99,18		

	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dikelola	6.755.929	6.755.929	100,00	6.755.929	6.755.929	100,00		7.598.831.700	7.536.213.500	99,18	Pemahaman dan tingkat keaktifan Operator Desa terhadap DTKS masih kurang (Sosialisasi tata cara pengusulan dan verval DTKS kepada Operator Desa)
			Keluarga	425.511	425.511	100,00	425.511	425.511	100,00					
			Keluarga	96	96	100,00	96	96	100,00					
			Orang											
	1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	6.755.929	6.755.929	100,00	6.755.929	6.755.929	100,00	7.181.440	89.400.000	77.773.500	86,99	

	2.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	425.511 Keluarg a	425.511	100,00	425.511	425.511	100,00		7.341.801.150	7.297.077.500	99,39	
	3.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	96 Orang	96	100,00	96	96	100,00		167.630.550	161.362.500	96,26	

4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	50	50	100,00	9.479 Orang	9.479 Orang	100,00	Okt - Des	90.000.000	82.843.750	92,05	
	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	9.433 Orang	9.433	100,00	9.433	9.433	100,00		50.000.000	45.373.750	90,75	
	1. Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	9.433 Orang	9.433	100,00	9.433	9.433	100,00		40.000.000	35.688.750	89,22	

	2.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	9.433 Orang	9.433	100,00	9.433	9.433	100,00		5.000.000	4.685.000	93,70	
	3.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	9.433 Orang	9.433	100,00	9.433	9.433	100,00		5.000.000	5.000.000	100,00	

	2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	46 Orang	46	100,00	46	46	100,00		40.000.000	37.470.000	93,68	
	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	46 Orang	46	100,00	46	46	100,00		40.000.000	37.470.000	93,68	
5.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	50	50	100,00	1.515 Orang	1.515	100,00	Okt - Des	1.725.190.300	1.661.350.375	96,30	

	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	1.335 Orang	1.335	100,00	1.335	1.335	100,00		1.575.190.300	1.523.985.375	96,75	
	1. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	1.050 Orang	1050	100,00	1.050	1050	100,00		574.000.000	561.736.525	97,86	

	2. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	50	100,00	50	50	100,00		210.000.000	197.062.750	93,84	
	3. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	95 Orang	95	100,00	95	95	100,00		311.251.200	289.835.000	93,12	

	4.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15	100,00	15	15	100,00		5.000.000	5.000.000	100,00	
	5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	50	100,00	50	50	100,00		426.000.000	422.730.000	99,23	
	6.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	10 Orang	10	100,00	10	10	100,00		5.000.000	4.427.000	88,54	

	Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											
	7. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	15	100,00	15	15	100,00		5.000.000	4.827.000	96,54	

	8.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	15	100,00	15	15	100,00		5.000.000	4.892.000	97,84	
	9.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15	100,00	15	15	100,00		5.000.000	4.902.000	98,04	
	10.	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20	100,00	20	20	100,00		28.939.100	28.573.100	98,74	

	2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	180 Orang	180	100,00	180	180	100,00		150.000.000	137.365.000	91,58	
	1. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	180	100,00	180	180	100,00		150.000.000	137.365.000	91,58	

6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100	100	100,00	6 Makam	0	-	Okt - Des	14.600.000	14.075.000	96,40	
	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	6 Makam	6	100,00	6	6	100,00		14.600.000	14.075.000	96,40	
	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	6 Makam	6	100,00	6	6	100,00		14.600.000	14.075.000	96,40	
TOTAL										15.419.906.990	14.623.110.444	94,83	

Sumber Data Dinas Sosial

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sampai dengan Tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

Tabel TC.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN
PENCAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL S/D TAHUN 2024
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama PD : DINAS SOSIAL

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program <i>(outcomes)</i> Kegiatan <i>(output)</i> Sub. Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program <i>(Renstra OPD)</i> Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub. Kegiatan s/d tahun (n.3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program /Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun Lalu (n.2)			Target Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan (Renja SKPD Tahun n.1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
								Target Renja SKPD Tahun (n.2) Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n.2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n.1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10 / 4)
				Urusan Sosial Bidang Urusan Sosial									
				Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun n					100%	67	67	100%

					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	80,48	80,50	80,98	100,60%	81	81,10	100,12%	
					Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10	90	90	95,53	106,14%	96,10	94,83	98,68%	
					Indeks Profesionalitas ASN	82	65	64,24	78,01	98.83%	82	79,72	97,22%	
				Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi	3	1	1	2	200%	3	3	100%	
06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah + jumlah Inovasi	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%	
06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%	
06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	

06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	
06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	82	60	60	78,01	130,02%	82	82	100%	
06	01	2.05	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	130 Steel	0	0	0%	0	0	0%	
06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlag orang yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%	80%	90%	95,53%	106,14%	96,10%	94,83%	98,68%	
06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	14 Bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	100%	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	100%	

06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	88%	85%	87%	87%	100%	88%	88%	100%	
06	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%	
06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%	
06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%	
06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	12 Paket	0	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%	
06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	

06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	88%	85%	87%	87%	100%	88%	88%	100%	
06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	85%	85%	85%	100%	90%	90%	100%	
06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dr Kemensos)	12 Bulan	13 Unit	13 Unit	100%	13 Unit	13 Unit	100%	

06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	0	3 Bulan	0	0	0%	0	0	0%	
06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	8 Unit	12 Bulan	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%	
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar									
06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75%	80%	75%	75%	100%	75%	75%	100%	

06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi	20 Orang, 18 Orang, 349 Lembaga	60 PSM, 18 TKSK, 15 KUBE, 8 LKSA dan 180 Orang pengurus LKSA, 322 Orang pengurus Katar, 50 Oang klien PW	50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga	50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga	100%	20 Orang, 18 Orang, 349 Lembaga	20 Orang, 18 Orang, 349 Lembaga	100%	
06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	20 Orang	60 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	100%	
06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	18 Orang	18 Orang	18 Orang	18 Orang	100%	18 Orang	18 Orang	100%	

06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	0	15 KUBE	0	0	0%	0	0	0%	
06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	349 Lembaga	8 LKSA dan 180 Orang pengurus LKSA, 322 Orang pengurus Katar, 50 Oang klien PW	41 Lembaga (LKS), 19 Pengurus Katar (Kec+Kab), 8 UEP Katar (Desa)	41 Lembaga (LKS), 19 Pengurus Katar (Kec+Kab), 8 UEP Katar (Desa)	100%	349 Lembaga	349 Lembaga	100%	
06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	50%	60%	55%	55%	100%	50%	50%	100%	
06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	1.335 Orang	18 Disabilitas, 9 Gepeng, 12 Bulan	181 Orang, 25 Orang, 50 Orang	181 Orang, 25 Orang, 50 Orang	100%	1.335 Orang	1.335 Orang	100	

06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	1.050 Orang	0	181 Orang	181 Orang	100%	1.050 Orang	1.050 Orang	100%	
06	04	2.01	0002	Penyedian Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	0	0	0	0%	50 Orang	50 Orang	100%	
06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	95 Orang	18 Orang	25 Orang	25 Orang	100%	95 Orang	95 Orang	100%	

06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	0	0	0	0%	15 Orang	15 Orang	100%	
06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	0	0	0	0%	50 Orang	50 Orang	100%	
06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	10 Orang	9 Orang Gepeng	0	0	0%	10 Orang	10 Orang	100%	

06	04	2.01	0007	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	0	0	0	0%	15 Orang	15 Orang	100%	
06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	0	0	0	0%	15 Orang	15 Orang	100%	
06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	0	0	0	0%	15 Orang	15 Orang	0%	

06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0	50 Orang	50 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	100%	
06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	0	12 Bulan	0	0	0%	0	0	0%	
06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pant Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pant Sosial yang direhabilitasi	180 Orang	186 KK, 20 Orang PSK, 150 Peserta adopsi, 1 kali razia, 150 Peserta ABH	50 Orang, 50 Orang, 50 Orang, 50 Orang	50 Orang, 50 Orang, 50 Orang, 50 Orang	100%	180 Orang	180 Orang	100%	

06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	180 Orang	186 KK	50 Orang	50 Orang	100%	180 Orang	180 Orang	100%
06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	0	0	50 Orang	50 Orang	100%	0	0	0%
06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	0	20 Orang PSK	0	0	0%	0	0	0%

06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten / Kota	0	0	50 Orang	50 Orang	100%	0	0	0%	
06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	0	0	50 Orang	50 Orang	100%	0	0	0%	
06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	0	20 Orang PSK, 150 Peserta adopsi, Disabilitas 18	0	0	0%	0	0	0%	

06	04	2.02	0014	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	0	1 Kali razia, 150 Peserta ABH	0	0	0%	0	0	0%	
06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	55%	60%	60%	60%	100%	55%	55%	100%	
06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dikelola	7.181.440 Keluarga, 96 Orang	19 Orang, 114 Orang, 304 Desa, 18 Kecamatan, '78.930 Keluarga	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 38.044 KPM	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 38.044 KPM	100%	7.181.440 Keluarga, 96 Orang	7.181.440 Keluarga, 96 Orang	100%	
06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang Didata	0	19 Orang, 114 Orang	0	0	0%	0	0	0%	

06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	6.755.929 Keluarga	304 Desa 18 Kecamatan	324.480 Keluarga	324.480 Keluarga	100%	6.755.929 Keluarga	6.755.929 Keluarga	100%	
06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	425.511 Keluarga	78.930 Keluarga	78.930 Keluarga	78.930 Keluarga	100%	425.511 Keluarga	425.511 Keluarga	100%	
06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	96 Orang	0	38.044 KPM	38.044 KPM	100%	96 Orang	96 Orang	100%	
06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	50%	60%	60%	60%	100%	50%	50%	100%	

06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	9.433 Orang	12 Bulan, 12 Bulan	371 Orang	371 Orang	100%	9.433 Orang	9.433 Orang	100%	
06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	9.433 Orang	12 Bulan	371 Orang	371 Orang	100%	9.433 Orang	9.433 Orang	100%	
06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	9.433 Orang	0	0	0	0%	9.433 Orang	9.433 Orang	100%	

06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten / Kota	0	12 Bulan	0	0	0%	0	0	0%	
06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	9.433 Orang	0	0	0	0%	9.433 Orang	9.433 Orang	100%	
06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	46 Orang	44 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	46 Orang	46 Orang	100%	
06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	46 Orang	44 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	46 Orang	46 Orang	100%	

06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	07	2.01		Pemeeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	6 Makam	0	6 Makam	6 Makam	100%	6 Makam	6 Makam	100%
06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	6 Makam	0	6 Makam	6 Makam	100%	6 Makam	6 Makam	100%

Sumber Data Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) kinerja lainnya dalam dokumen perencanaan yang ada mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK).

Adapun sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator sasaran Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Tahun 2024 terealisasi sebesar 97,97% dan tingkat capaian sebesar 107,66.

Faktor keberhasilan yaitu :

- ✓ Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan KAK;
- ✓ Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran;
- ✓ Pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan anggaran kas;
- ✓ Keterlibatan ASN Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Pilar-pilar Sosial, dan Instansi terkait.

Faktor kegagalan :

- ✓ Pemahaman dan tingkat keaktifan Operator Desa terhadap DTKS masih kurang;
- ✓ DTKS yang belum valid, sehingga berdampak pada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial , tetapi belum tercover.

Rencana tindak lanjut :

- ✓ Sosialisasi tata cara pengusulan dan verval DTKS kepada Operator Desa;
- ✓ Updating data per bulan;
- ✓ Monitoring dan evaluasi.

Adapun kinerja lainnya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator kinerja :
 - a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
 - b. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah;
 - c. Indeks Profesionalitas ASN.

Tahun 2024 rata-rata capaian terealisasi sebesar 98,67.

Faktor keberhasilan adalah :

- ✓ Bukti dukung yang relevan;
- ✓ Keterlibatan ASN Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan Instansi terkait.

Faktor Kegagalan :

- ✓ Dokumen perencanaan yang disusun belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART;
- ✓ Sisa pengadaan dan gaji;
- ✓ Banyak pegawai yang pensiun, sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran dan kinerja;
- ✓ Banyak pegawai yang tidak mengikuti diklat dan pelatihan.

Rencana tindak lanjut :

- ✓ Melakukan reviu dokumen Renstra Dinas Sosial Tahun 2021- 2026 yang memuat indikator kinerja tujuan dan sasaran sesuai perubahan Pokin hasil Evaluasi SAKIP Dinas Sosial oleh Kemenpan;
- ✓ Pengisian/perekrutan PNS;
- ✓ Pengusulan untuk mengikuti diklat dan pelatihan.

2. Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan.

Tahun 2024 terealisasi sebanyak 3 dari 3 target dan tingkat capaian sebesar 100%.

Faktor keberhasilan adalah :

- ✓ Dokumentasi yang relevan;
- ✓ Keterlibatan ASN Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto;
- ✓ Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan sebanyak 3 dan terealisasi 3.

Faktor Kegagalan :

- ✓ Perlu adanya SK Kepala Dinas untuk melegalkan bahwa Inovasi tersebut diakui.

Rencana tindak lanjut :

- ✓ SK Kepala Dinas untuk melegalkan bahwa Inovasi tersebut diakui.

Dengan rata-rata capaian kinerja keseluruhan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebesar 103,50%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar dari 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk Tahun 2024 seluruhnya telah dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel 2.3. berikut ini.

Tabel 2.3.
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber data
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	91	97,97	107,66	Sangat Tinggi	Dinas Sosial

Sumber Data Dinas Sosial

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis 1 : **“Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)”** dengan indikator kinerja **Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar**, Tahun 2024 terealisasi sebesar 97,97 dan tingkat capaian sebesar 107,66% dengan predikat **Sangat Berhasil**.
Perhitungan rata-rata capaian sebesar 97,97 diperoleh dari formulasi :

Jumlah penerima bantuan sosial dan layanan sosial

X 100

DTKS

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan/kegagalan dan pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel 2.4. berikut ini.

Tabel 2.4.
Indikator Kinerja Program Berdasarkan Target dan Realisasi
Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75	75	100	
2.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	55	55	100	
3.	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan Sosial	50	50	100	SPM
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	50	50	100	SPM
5.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100	100	100	

Sumber Data Dinas Sosial

Hasil capaian kinerja sasaran **Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)** melalui Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Rehabilitasi Sosial, dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pada hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%. Dari indikator *output* diatas, hasil (*outcome*) yang diharapkan adalah terwujudnya penurunan PPKS penerima manfaat kesejahteraan sosial.

Adapun perhitungan rata-rata Capaian Kinerja Program sebesar 100% diperoleh dari formulasi perhitungan sebagaimana tersebut pada tabel 2.5. berikut ini.

Tabel 2.5.
Formulasi Capaian Kinerja Progam
Berdasarkan Indikator Kinerja Program Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja
1	Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial 100 X Jumlah PSKS yang seharusnya menerima manfaat program pemberdayaan sosial
2	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah KPM penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 100 X Jumlah KPM yang seharusnya menerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3	Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	Jumlah Tagana, korban bencana alam dan sosial penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 100 X Jumlah Tagana, korban bencana alam dan sosial yang seharusnya menerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4	Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS penerima manfaat kesejahteraan sosial 100 X Jumlah PPKS yang seharusnya menerima manfaat kesejahteraan sosial

5	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikeloa	Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Mantan Bupati yang dipelihara dan terawat dengan Baik 100 X Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Mantan Bupati yang seharusnya dipelihara dan terawat dengan Baik
---	----------------------------------	---	---

Sumber Data Dinas Sosial

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.6. (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

TABEL 2.6. (T-C 30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA OPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN AKHIR
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	2025 (n=)	2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	2025 (n=)	2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%		75%	75%	65%	60%	75%	75%	65%	60%	
2.	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%		60%	55%	55%	50%	60%	55%	55%	50%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	100%		55%	50%	45%	40%	55%	50%	45%	40%	
4.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan Sosial	100%		60%	50%	50%	40%	60%	50%	50%	40%	
5.	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber Data Dinas Sosial

2.3. Isu-isu penting

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto merumuskan isu strategis yang penting dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan sebagai berikut pada tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
Dari Masing-masing Sub Urusan

NO	ISU-ISU STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN YANG MENJADI SOLUSI	INOVASI
1	2	3	4
1	Kemiskinan Ekstrem.	Program : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Program : Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub. Kegiatan : 1. Penyediaan Permakanan. 2. Penyediaan Sandang. 3. Penyediaan Alat Bantu.	a) SANG PATIH KESOS (Sarana Pengaduan Dengan Pelayanan Hati dan Kasih Sayang dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial) b) BULIK SOIMA (Bupati Tilik Deso Mirsani Masyarakat) c) GERBANG KESOS (Gerakan Edukasi serta Pemberian Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub. Kegiatan : 1. Penyediaan Permakanan. Program : Penangan Bencana Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : 1. Penyediaan Makanan. 2. Penyediaan Sandang.	
2.	Perlindungan Sosial	Program : Penangan Bencana Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : 1. Pelayanan Dukungan Psikososial. Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana. Program : Pemberdayaan Sosial Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	

		Sub. Kegiatan : 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. Program : Penangan Rehabilitasi Sosial Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub. Kegiatan : 1. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga. 2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial. 3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat. 4. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak. 5. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. 6. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan. 7. Pemberian Layanan Kedaruratan.	
--	--	--	--

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 program, kegiatan dan sub. kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program, kegiatan dan sub. kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan Perangkat Daerah dilaksanakan melalui mekanisme/tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik).

Restrukturisasi Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan/Sub. Kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Selengkapnya sebagaimana tabel 2.8. (T-C.31) berikut :

TABEL T-C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS SOSIAL KABUPATEN
MOJOKERTO

NO	RANCANGAN AWAL RKPD									HASIL ANALISI KEBUTUHAN							CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU INDIKATIF SETELAH REFOCUSING (Rp)	PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	KEBUTUHAN DANA SETELAH REFOCUSING (Rp)	KEBUTUHAN DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Dinas Sosial	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81,05					Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Dinas Sosial	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81,05					
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%								Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%				

			Indeks Profesionalitas ASN	81						Indeks Profesionalitas ASN	81					
	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Dinas Sosial	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3					Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Dinas Sosial	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial	Nilai SAKIP Perangkat Daerah + Jumlah Inovasi	90%	11.660.682.915	11.660.682.915	11.660.682.915	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial	Nilai SAKIP Perangkat Daerah + Jumlah Inovasi	90%	5.663.945.390	5.663.945.390	5.663.945.390	0
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	90%	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	90%	18.300.000	18.300.000	18.300.000	0

	1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9.025.000	9.025.000	9.025.000	0	
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	9.275.000	9.275.000	9.275.000	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%	8.000.087.075	8.000.087.075	8.000.087.075	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%	4.765.826.000	4.765.826.000	4.765.826.000	0	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	8.000.087.075	8.000.087.075	8.000.087.075	0	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	4.765.826.000	4.765.826.000	4.765.826.000	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	81	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	81	0	0	0	0	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	89%	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	89%	268.258.100	268.258.100	268.258.100	0	
	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	470.000.000	470.000.000	470.000.000	0	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	96.493.200	96.493.200	96.493.200	0	
	2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.906.900	19.906.900	19.906.900	0	
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	

	4. Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan / Material yang Disedi akan	12 Paket	100.000 .000	100.000 .000	100.000 .000	0	4. Penyediaan Bahan/Materia l		Jumlah Paket Bahan / Material yang Disedi ak an	12 Paket	50.000. 000	50.000. 000	50.000.00 0	0	
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Lapora n Penyel enggar aan Rapat Koordi nasi dan Konsul tasi SKPD	12 Laporan	300.000 .000	300.000 .000	300.000 .000	0	5. Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyel en ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD	12 Laporan	51.858. 000	51.858. 000	51.858.00 0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Perse ntase Penye diaan Jasa Penun jang Urusa n Pemer intaha n Daera h Sesuai Kebut uhan	89%	347.595 .840	347.595 .840	347.595 .840	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persenta se Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah sesuai Kebutuh an	89%	347.595 .840	347.595 .840	347.595.8 40	0	

	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	225.000.000	225.000.000	225.000.000	0	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	225.000.000	225.000.000	225.000.000	0	
	2. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	122.595.840	122.595.840	122.595.840	0	2. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	122.595.840	122.595.840	122.595.840	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	1.813.000.000	1.813.000.000	1.813.000.000	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	263.965.450	263.965.450	263.965.450	0	

	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dr Kemensos)	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dr Kemensos)	177.113.200	177.113.200	177.113.200	0	
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit/Gedung	1.013.000.000	1.013.000.000	1.013.000.000	0	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	0	0	0	0	0	
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	8 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	8 Unit	86.852.250	86.852.250	86.852.250	0	

	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Dinas Sosial	Perse ntase Pemer lu Penya ndang Keseja hteraa n Sosial (PPKS) yang memp eroleh bantua n sosial untuk pemen uhan kebutu han dasar	97,98%					Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Dina s Sosi al	Persenta se Pemerlu Penyand ang Kesejaht eraan Sosial (PPKS) yang memper oleh bantuan sosial untuk pemenu han kebutuh an dasar	97,98%					
2	PROGRAM PEMBERDAYAN SOSIAL	Dinas Sosial	Perse ntase PSKS yang menda patkan pembi naan dan aktif dalam penyel engga raan keseja hteraa n sosial	65%	3.779.1 20.730	3.779.1 20.730	3.779.1 20.730	0	PROGRAM PEMBERDAYAN SOSIAL	Dina s Sosi al	Persenta se PSKS yang mendap atkan pembina an dan aktif dalam penyele nggaraa n kesejaht eraan sosial	65%	279.000 .000	279.000 .000	279.000.0 00	0	Mendu kung Progra m Unggu lan Bupati Peduli PPKS dan Mileni al Kreatif
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumla h PSKS yang dibina dan difasili tasi	75 PSM, 18 TKSK, 90 Keluarga, 35 Lembaga	3.779.1 20.730	3.779.1 20.730	3.779.1 20.730	0	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PSKS yang dibina dan difasilita si	72 Orang, 90 Lembaga	279.000 .000	279.000 .000	279.000.0 00	0	

	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	75 Orang	53.000.000	53.000.000	53.000.000	0	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	54 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	18 Orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	18 Orang	115.000.000	115.000.000	115.000.000	0	
	3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	90 Keluarga	54.227.500	54.227.500	54.227.500	0	3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	0	0	0	0	0	

	4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	35 Lembaga	1.745.696.615	1.745.696.615	1.745.696.615	0	4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	90 Lembaga	159.000.000	159.000.000	159.000.000	0	
	5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten /Kota	35 Sertifikat	1.745.696.615	1.745.696.615	1.745.696.615	0	5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten /Kota	0 Sertifikat	0	0	0	0	

3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	Perse ntase PPKS peneri ma manfa at Progra m Perlin dunga n dan Jamin an Sosial	55%	12.624.124.268	12.624.124.268	12.624.124.268	0	PROGRAM PERLINDUNGA N DAN JAMINAN SOSIAL	Dina s Sosi al	Persenta se PPKS penerim a manfaat Program Perlindu ngan dan Jaminan Sosial	55%	9.675.743.700	9.675.743.700	9.675.743.700	0	Mendu kung Progra m Unggu lan Bupati Perem puan Berkar ya, Gerce p Stunti ng dan Peduli PPKS (Masy arakat Miskin , Disabl itas Dan Lansia)
	Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar		Jumla h Data Anak Terlan tar yang Menda patkan Perlin dunga n Sosial	300 Orang	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar		Jumlah Data Anak Terlanta r yang Mendap atkan Perlindu ngan Sosial	Orang	0	0	0	0	
	1. Penjangkauan Anak - Anak Terlantar		Jumlah Anak- Anak Terlant ar yang Dijang kau Kewen angan Kabup aten/K ota	100 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	1. Penjangkauan Anak - Anak Terlantar		Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenan gan Kabupat en/Kota	0 Orang	0	0	0	0	

	2. Rujukan Anak- Anak Terlantar		Jumlah Anak - Anak Terlant ar yang menda pat Rujuka n Kewen angan Kabup aten/K ota	100 Orang	50.000. 000	50.000. 000	50.000. 000	0	2. Rujukan Anak- Anak Terlantar		Jumlah Anak - Anak Terlantar yang mendapa t Rujukan Kewenan gan Kabupat en/Kota	0 Orang	0	0	0	0	
	3. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlant ar yang Terpan tau dan Terpeli hara Kewen angan Kabup aten/K ota	100 Orang	50.000. 000	50.000. 000	50.000. 000	0	3. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpanta u dan Terpeliha ra Kewenan gan Kabupat en/Kota	0 Orang	0	0	0	0	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumla h data fakir miskin yang dikelol a	29.309 KPM, 324.480 Keluarga, 78,930 Keluarga, 34.163 Orang	12.474. 124.268	12.474. 124.268	12.474. 124.268	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data fakir miskin yang dikelola	222.430 Keluarga, 20 Orang	9.675.7 43.700	9.675.7 43.700	9.675.743 .700	0	
	1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakup an Daerah Kabup aten / Kota yang Didata	29.309 KPM	375.000 .000	375.000 .000	375.000 .000	0	1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Ko ta		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupat en / Kota yang Didata	0	0	0	0	0	

	2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	324.480 Keluarga	375.000.000	375.000.000	375.000.000	0	2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	215.000 Keluarga	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	
	3. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	78,930 Keluarga	11.224.124.268	11.224.124.268	11.224.124.268	0	3. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	7.430 Keluarga	9.505.743.700	9.505.743.700	9.505.743.700	0	
	4. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	34.163 Orang	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	4. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	20 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	

4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	Perse ntase korba n benca na alam dan sosial yang menda pat perlin dunga n sosial	50%	900.000 .000	900.000 .000	900.000 .000	0	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dina s Sosi al	Persenta se korban bencana alam dan sosial yang mendap at perlindu ngan sosial	50%	105.000 .000	105.000 .000	105.000.0 00	0	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumla h perlin dunga n sosial korba n Benca na Alam dan Sosial Kabup aten/K ota	400 Orang, 10 Tempat	600.000 .000	600.000 .000	600.000 .000	0	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah perlindu ngan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupat en/Kota	1.000 Orang	85.000. 000	85.000. 000	85.000.00 0	0	
	1. Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Menda patkan Perma kanan 3x1 Hari Dalam Masa Tangg ap Darura t (Pengu ngsian) Kewen angan Kabup aten / Kota	400 Orang	150.000 .000	150.000 .000	150.000 .000	0	1. Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapa tkan Permaka nan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengu ngsian) Kewenan gan Kabupat en / Kota	500 Oang	75.000. 000	75.000. 000	75.000.00 0	0	

	2. Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	400 Orang	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	2. Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	250 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten / Kota	10 Tempat	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten / Kota	0 Tempat	0	0	0	0	

	4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rutin		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	250 Orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	4. Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 Orang	0	0	0	0	
	5. Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	400 Orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	6. Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	250 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	

	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	50 Kampung, 50 Orang	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	46 Orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Kampung	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	0	0	0	

	2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
5	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	Perse ntase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	45%	5.725.000.000	5.725.000.000	5.725.000.000	0	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	45%	1.545.927.967	1.545.927.967	1.545.927.967	0	Mendukung Program Unggulan Bupati Peduli PPKS (Anak Terlantar dan Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Minoritas)

	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	1.160 Orang	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	0	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	1.045 Orang	1.380.927.967	1.380.927.967	1.380.927.967	0	
	1. Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	300 Orang	750.000.000	750.000.000	750.000.000	0	1. Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	820 Orang	616.000.000	616.000.000	616.000.000	0	

	2. Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	300 Orang	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	2. Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	
	3. Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	35 Orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	3. Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	35 Orang	120.988.867	120.988.867	120.988.867	0	
	4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	

	5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	440.000.000	440.000.000	440.000.000	0	
	6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	10 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	

	7. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	7. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	

	9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	10. Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	75 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	10. Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	20 Orang	28.939.100	28.939.100	28.939.100	0	
	11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	75 Orang	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	0 Orang	0	0	0	0	

	12. Pemberian Layanan Rujukan		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	75 Orang	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	12. Pemberian Layanan Rujukan		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	0 Orang	0	0	0	0	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	1.529 Orang	3.525.000.000	3.525.000.000	3.525.000.000	0	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	188 Orang	165.000.000	165.000.000	165.000.000	0	
	1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	475.000.000	475.000.000	475.000.000	0	1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	0	0	0	

	2. Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	475.000.000	475.000.000	475.000.000	0	2. Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	0	0	0	
	3. Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	186 Orang	475.000.000	475.000.000	475.000.000	0	3. Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	188 Orang	165.000.000	165.000.000	165.000.000	0	

	4. Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	175.000.000	175.000.000	175.000.000	0	4. Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	0 Orang	0	0	0	0	
	5. Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	40 Orang	175.000.000	175.000.000	175.000.000	0	5. Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	0 Orang	0	0	0	0	

	6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten / Kota	0 Orang	0	0	0	0	
	7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	450.000.000	450.000.000	450.000.000	0	7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	0 Orang	0	0	0	0	

	8.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	175 Orang	175.000 .000	175.000 .000	175.000 .000	0	8.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	0 Orang	0	0	0	0	
--	----	---	--	--	-----------	--------------	--------------	--------------	---	----	---	--	--	---------	---	---	---	---	--

	9. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Membuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan / atau Identitas Anak bagi Penyang Masalah Kesehatan Sosisal (PMKS) Lainnya di Luar HIV / AIDS Kewenangan Kabupaten / Kota	175 Orang	175.000.000	175.000.000	175.000.000	0	9. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Membuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan / atau Identitas Anak bagi Penyang Masalah Kesejahteraan Sosisal (PMKS) Lainnya di Luar HIV / AIDS Kewenangan Kabupaten / Kota	0 Orang	0	0	0	0	
--	--	--	---	-----------	-------------	-------------	-------------	---	--	--	---	---------	---	---	---	---	--

	10. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	175 Orang	175.000.000	175.000.000	175.000.000	0	10. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	0 Orang	0	0	0	0	
	11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	175 Orang	175.000.000	175.000.000	175.000.000	0	11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	0 Orang	0	0	0	0	

	12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Terpen uhinya Orang yang Menda patkan Pelaya nan Reunifi kasi Kelu ar ga Kewen angan Kabup aten / Kota	175 Orang	175.000 .000	175.000 .000	175.000 .000	0	12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Terpen uhinya Orang yang Mendapa tka n Pelayana n Reunifika si Kelu ar ga Kewen angan Kabupat en / Kota	0 Orang	0	0	0	0	
	13. Pemberian Layanan Rujukan		Terlaks ananya Pembe rian Layana n Rujuka n Kewen angan Kabup aten/K ota	175 Orang	175.000 .000	175.000 .000	175.000 .000	0	13. Pemberian Layanan Rujukan		Terlaksa nanya Pemberi an Layanan Rujukan Kewen angan Kabupat en/Kota	0 Orang	0	0	0	0	

	14. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	3 Dokumen	175.000.000	175.000.000	175.000.000	0	14. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	0 Orang	0	0	0	0	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100%	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100%	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	

	Pemeiliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumla h Maka m yang Terpe nuhi Pemeli haraan pada Taman Maka m Pahla wan Kabup aten / Kota	6 Makam	20.000. 000	20.000. 000	20.000. 000	0	Pemeiliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah Makam yang Terpenu hi Pemelih araan pada Taman Makam Pahlawa n Kabupat en / Kota	6 Makam	10.000. 000	10.000. 000	10.000.00 0	0	
	1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Dokum en Hasil Rehabi litasi serta Pemeli haraan Sarana dan Prasar ana Taman Makam Pahlaw an Nasion al Kabup aten / Kota	0 Dokumen	0	0	0	0	1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Ko ta		Jumlah Dokume n Hasil Rehabilit asi serta Pemeliha raan Sarana dan Prasaran a Taman Makam Pahlawa n Nasional Kabupat en / Kota	0 Dokumen	0	0	0	0	

	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan nya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	6 Makam	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan nya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	6 Makam	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	3. Pengamanan Taman Makam Nasional Kabupaten /Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	0 Laporan	0	0	0	0	3. Pengamanan Taman Makam Nasional Kabupaten /Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	0 Laporan	0	0	0	0	
					34.728.927.913	34.728.927.913	34.728.927.913	0					17.279.617.057	17.279.617.057	17.279.617.057	0	

Sumber Data Dinas Sosial

Mojokerto, Januari 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO

TRY RAHARJO MURDIANTO, S.STP., M.AP.
NIP. 19870519 200602 1 002

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat tiga pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya.

Selanjutnya dari hasil penelitian dan usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu bersama dengan Bappeda Kabupaten Mojokerto, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan pihak pemangku kepentingan, antara lain :

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes;
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan;
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu -isu penting dari masing-masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 :

(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

TABEL 2.9. (TC.32)
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUMEN	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

Sumber Data Dinas Sosial

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Visi dan Misi

Visi

1. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Visi yang disusun memberikan gambaran ideal yang hendak diwujudkan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.
2. Visi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah yang disusun di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto digali bersama, diupayakan pencapaiannya secara bersama-sama karena visi tersebut merupakan milik bersama yang diyakini dapat dicapai bersama aparatur yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Visi yang disusun ini diharapkan mampu menjadi akselerator dan dinamisator bagi upaya peningkatan kinerja aparatur di aparatur
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka visi Dinas Sosial adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”**.

Misi

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut di atas disusunlah misi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah :

2. **Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan.**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Sedangkan 5 agenda prioritas pembangunan Nasional (Nawa Cita) terdiri dari :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja;
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup;
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan dalam rangka mencapai misi tersebut di atas, sejumlah tujuan yang dicapai Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto meliputi :

1. **Untuk mewujudkan misi 2** : Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan, maka ditetapkan **tujuan** yaitu : **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berdimensi Kerakyatan.**

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagaimana diuraikan berikut.

1. **Untuk mewujudkan misi dari tujuan** : maka ditetapkan **sasaran** yaitu :
 - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dengan **Indikator Sasaran** Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pada 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1.
TARGET KINERJA DARI TUJUAN DAN SASARAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berdimensi Kerakyatan			Indeks Gini	NA	9,97%	9,77%	9,57%	9,37%	9,35%
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	NA	80%	80%	85%	85%	90%
			Pembeerdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	NA	80%	75%	75%	65%	60%
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	NA	60%	60%	55%	55%	50%
			Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	NA	60%	60%	50%	50%	40%
			Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	NA	60%	55%	50%	45%	40%
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	NA	NA	100%	100%	100%	100%

Sumber Data Dinas Sosial

3.3. Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagaimana yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah + Jumlah Inovasi, terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan;
2. Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator kinerja Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan;
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan indikator kinerja Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan;
4. Program Penanganan Bencana dengan indikator kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan;
5. Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator kinerja Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator kinerja Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.

Adapun uraian dari program, kegiatan dan sub kegiatan dari Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi. Pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah + Jumlah Inovasi dengan target 90%

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target, dengan target 90%.

Sub. Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target 9 dokumen.
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target 10 laporan.

Kegiatan :

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, dengan target 96,10%.

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target 40 orang/bulan.

Kegiatan :

- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan, dengan target 89%.

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan target 12 laporan.

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, dengan target 12 laporan.

Kegiatan :

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan, dengan target 89%.

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, dengan target 12 paket.

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, dengan target 12 paket.

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, dengan target 12 paket.

4. Penyediaan Bahan/Material

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, dengan target 12 paket.

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target 12 laporan.

Kegiatan :

- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik, dengan target 90%.

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan target 13 Unit.

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, dengan target 8 unit.

Kegiatan :

- f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah IP ASN Perangkat Daerah, dengan target nilai 81.

2) Program Pemberdayaan Sosial

Pencapaian kinerja program ini adalah Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan target 65%.

Kegiatan :

- a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi, dengan target 72 Orang, dan 90 Lembaga.

Sub. Kegiatan :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target 54 Orang.
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target 18 Orang.
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan target 90 Lembaga.

3) Program Rehabilitasi Sosial

Pencapaian kinerja program ini adalah Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial, dengan target 45%.

Kegiatan :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi, dengan target 1.045 Orang.

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Permakanan.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan target 820 Orang.

2. **Penyediaan Sandang**
 Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota dengan target 50 Orang.
3. **Penyediaan Alat Bantu.**
 Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target 34 Orang.
4. **Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga**
 Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 15 Orang.
5. **Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial**
 Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota dengan target 50 Orang.
6. **Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.**
 Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 10 Orang.
7. **Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak**
 Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas dengan target 15 Orang.
8. **Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar**
 Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota dengan target 15 Orang.

9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 15 Orang.
10. Pemberian Layanan Kedaruratan.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota dengan target 20 Orang.

Kegiatan :

- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi, dengan target 188 Orang.

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Permakanan.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target 188 Orang.

4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pencapaian kinerja program ini adalah Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan target 55%.

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah data fakir miskin yang dikelola, dengan target 222.430 Keluarga, 20 Orang.

Sub. Kegiatan :

1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota, dengan target 215.000 Keluarga.
2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan target 7.430 Keluarga.
3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan target 20 Orang.

5) Program Penanganan Bencana

Pencapaian kinerja program ini adalah Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial, dengan target 50%.

Kegiatan :

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan target 1.000 Orang.

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Makanan.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target 500 Orang.
2. Penyediaan Sandang.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota dengan target 250 Orang.

3. Pelayanan Dukungan Psikososial.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan target 250 Orang.

Kegiatan :

b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Tagana yang dibina, dengan target 46 Orang.

Sub. Kegiatan :

1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, dengan target 46 Orang.

6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pencapaian kinerja program ini adalah Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola, dengan target 100%.

Kegiatan :

a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota, dengan target 6 Makam.

Sub. Kegiatan :

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dan Makam Mantan Bupati yang terawat dengan Baik, dengan target 6 Makam.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dapat di uraikan pada Tabel TC-33 sebagai berikut :

Tabel TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN MOJOKERTO

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
					Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		68				69	
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81,05				81,10	
						Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi		3				3	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah + Jumlah Inovasi	Dinas Sosial	90%	5.663.945.390	APBD		90%	5.922.678.740
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		90%	18.300.000				17.024.200
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9 Dokumen	9.025.000			9 Dokumen	8.512.100
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10 Laporan	9.275.000			10 Laporan	8.512.100
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		96,10%	4.765.826.000	APBD		9,15%	4.751.026.000
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang/ Bulan	4.765.826.000			40 Orang/ Bulan	4.751.026.000

1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah		81	0	APBD		81,05	0
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		89%	268.258.100	APBD		90%	386.341.950
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	96.493.200			12 Paket	100.000.000
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	19.906.900			12 Paket	20.000.000
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	50.000.000			12 Paket	50.000.000
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan		12 Paket	50.000.000			12 Paket	156.341.950
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	51.858.000			12 Laporan	60.000.000
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		89%	347.595.840	APBD		90%	347.595.840
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	225.000.000			12 Laporan	225.000.000
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	122.595.840			12 Laporan	122.595.840
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		90%	263.965.450	APBD		90%	807.032.700
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dr Kemensos)	177.113.200			13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dr Kemensos)	206.441.350
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		8 Unit	86.852.250			8 Unit	90.000.000

1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		0	0			5 Unit	510.591.350
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		65%	279.000.000	APBD		65%	364.028.760
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi		72 Orang, 90 Lembaga	279.000.000	APBD		78 Orang, 90 Lembaga	364.028.760
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota		54 Orang	5.000.000			78 Orang	213.826.360
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya		18 Orang	115.000.000			0	0
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota		90 Lembaga	159.000.000			90 Lembaga	150.202.400
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial		45%	1.545.927.967	APBD		45%	1.843.036.300
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		1.045 Orang	1.380.927.967	APBD		1.093 Orang	1.647.739.400
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota		820 Orang	616.000.000			850 Orang	700.000.000
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota		50 Orang	150.000.000			50 Orang	196.346.600

1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota		35 Orang	120.988.867			53 Orang	196.152.400
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Orang	5.000.000			15 Orang	15.000.000
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota		50 Orang	440.000.000			50 Orang	450.000.000
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota		10 Orang	5.000.000			10 Orang	4.030.300
1	06	04	2.01	0007	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota		15 Orang	5.000.000			15 Orang	4.304.250
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota		15 Orang	5.000.000			15 Orang	4.402.600
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Orang	5.000.000			15 Orang	11.255.000
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota		20 Orang	28.939.100			20 Orang	66.248.250
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		188 Orang	165.000.000			196 Orang	195.296.900
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota		188 Orang	165.000.000			196 Orang	195.296.900

1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		55%	14.625.743.700			55%	7.774.415.740
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dikelola		222.430 Keluarga, 20 Orang	14.625.743.700			222.430 Keluarga, 215.000 Orang	7.774.415.740
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota		215.000 Keluarga	120.000.000			215.000 Keluarga	47.835.000
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota		7.430 Keluarga	9.505.743.700			7.430 Keluarga	7.583.843.500
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota		20 Orang	50.000.000			215.000 Orang	142.737.240
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan Sosial		50%	105.000.000			50%	198.091.600
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		1.000 Orang	85.000.000			30.000 Orang,	170.000.000
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota		500 Orang	75.000.000			10.000 Orang	150.000.000
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota		250 Orang	5.000.000			10.000 Orang	10.000.000
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota		250 Orang	5.000.000			10.000 Orang	10.000.000
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		46 Orang	20.000.000			50 Orang	28.091.600

1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota		46 Orang	20.000.000			50 Orang	28.091.600
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola		100%	10.000.000			100%	15.000.000
1	06	07	2.01		Pemeeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota		6 Makam	10.000.000			6 Makam	15.000.000
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota		6 Makam	10.000.000			6 Makam	15.000.000
TOTAL									17.279.617.057				16.117.251.140

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian Rencana Kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam Rencana Kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program, kegiatan dan sub. kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, sub. Kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub. kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Disamping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program, kegiatan dan sub. kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Perangkat Daerah. Pengukuran kinerja Perangkat Daerah akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi Perangkat Daerah yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja Perangkat Daerah pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran Perangkat Daerah dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja Perangkat Daerah secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja Perangkat Daerah tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mempunyai kinerja 2 (dua) yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja. Yaitu kinerja utama dan kinerja lainnya.

- Kinerja Utama :

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dengan indikator kinerja ***Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.***

Dengan target Tahun 2025 sebesar 97,98%.

- Kinerja Lainnya :

1. ***Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel*** dengan indikator kinerja :

- a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan target nilai untuk Tahun 2025 adalah 81,05.
- b. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, dengan target Tahun 2025 adalah 96,10%.
- c. Indeks Profesionalitas ASN, dengan target nilai di Tahun 2025 adalah 81.

2. ***Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah”*** dengan indikator ***Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan.***

Untuk Tahun 2025, inovasi berkelanjutan Dinas Sosial ada 3.

Dalam mendukung kinerja lainnya, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan uraian sebagai berikut :

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pencapaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dan Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah.

Dengan indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah + Jumlah Inovasi dengan target 90%.

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target, dengan target 90%.

Sub. Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target 9 dokumen.
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target 10 laporan.

Kegiatan :

- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah IP ASN Perangkat Daerah, dengan target nilai 81%.

Kegiatan :

- c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, dengan target 96,10%.

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target 40 orang/bulan.

Kegiatan :

- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan, dengan target 89%.

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan target 12 laporan.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, dengan target 12 laporan.

Kegiatan :

- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan, dengan target 89%.

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, dengan target 12 paket.
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, dengan target 12 paket.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, dengan target 12 paket.
4. Penyediaan Bahan/Material
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, dengan target 12 paket.
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target 12 laporan.

Kegiatan :

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik, dengan target 90%.

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan target 13 Unit.
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, dengan target 8 unit.

Dalam mendukung kinerja utama, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto didukung oleh Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan uraian sebagai berikut :

1) Program Pemberdayaan Sosial

Pencapaian kinerja program ini adalah Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan target 65%.

Kegiatan :

- a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi, dengan target 72 Orang, dan 90 Lembaga.

Sub. Kegiatan :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target 54 Orang.
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target 18 Orang.

3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan adalah Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan target 90 Lembaga.

2) **Program Rehabilitasi Sosial**

Pencapaian kinerja program ini adalah Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial, dengan target 45%.

Kegiatan :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi, dengan target 1.045 Orang.

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Permakanan.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan target 820 Orang.

2. Penyediaan Sandang

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota dengan target 50 Orang.

3. Penyediaan Alat Bantu.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target 35 Orang.

4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 15 Orang.

5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota dengan target 50 Orang.

6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 10 Orang.
7. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas dengan target 15 Orang.
8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota dengan target 15 Orang.
9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 15 Orang.
10. Pemberian Layanan Kedaruratan.
Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota dengan target 20 Orang.

Kegiatan :

- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi, dengan target 188 Orang

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Permakanan.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target 188 Orang.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pencapaian kinerja program ini adalah Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan target 55%.

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah data fakir miskin yang dikelola, dengan target 222.430 Keluarga, 20 Orang.

Sub. Kegiatan :

1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota, dengan target 215.000 Keluarga.

2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan target 7.430 Keluarga.

3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan target 20 Orang.

4) Program Penanganan Bencana

Pencapaian kinerja program ini adalah Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial, dengan target 50%.

Kegiatan :

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan target 1.000 Orang.

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Makanan.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target 500 Orang.

2. Penyediaan Sandang.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota dengan target 250 Orang.

3. Pelayanan Dukungan Psikososial.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan target 250 Orang.

Kegiatan :

- b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Tagana yang dibina, dengan target 46 Orang.

Sub. Kegiatan :

1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, dengan target 46 Orang.

5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pencapaian kinerja program ini adalah Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola, dengan target 100%.

Kegiatan :

- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota, dengan target 6 Makam.

Sub. Kegiatan :

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota.

Dengan indikator kinerja sub. Kegiatan ini adalah Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dan Makam Mantan Bupati yang terawat dengan Baik, dengan target 6 Makam.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program, kegiatan dan sub. kegiatan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE SKPD : 1.06.6.01.01
NAMA SKPD : DINAS SOSIAL

No.	KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			LOKASI	APBD KAB (Rp).	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			OPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	Rp.	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<u>TUJUAN :</u> Menurunnya Angka Kemiskinan			<u>INDIKATOR TUJUAN :</u> Angka Kemiskinan									
		<u>SASARAN LAINNYA :</u> Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,05	Dinas Sosial						
					Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%	Dinas Sosial						
					IP ASN	IP ASN Perangkat Daerah	81	Dinas Sosial						
		Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah			Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi	3	Dinas Sosial						

	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Nilai SAKIP Perangkat Daerah + Jumlah Inovasi		90%	Dinas Sosial	5.663.945.390					
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			L	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		90%	Dinas Sosial	18.300.000					
	1.06.01.2.01.0001	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		L	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan dokumen : 1. Rancangan Awal Renja; 2. Rancangan Renja; 3. Rancangan Akhir Renja; 4. Renja; 5. Rancangan Perubahan; 6. Perubahan Renja; 7. Rancangan dan Reviuw Renstra; 8. PK APBD; 9. PK PAPBD.	9 Dokumen		9.025.000	-	0	-	0	-
	1.06.01.2.01.0007	2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		L	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Laporan : 1. SPM; 2. LPPD; 3. LKJIP; 4. LKPJ; 5. AKSARA; 6. SAKIP; 7. Satu Data Palapa; 8. SPIP; 9. KKS; 10. SDG's.	10 Laporan		9.275.000	-	0	-	0	-

	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			L	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		96%	Dinas Sosial	4.765.826.000					
	1.06.01.2.02.0001	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		L	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Anggaran Penyediaan Gaji + Gaji 13 dan 14 ASN dan Tunjangan	40 Orang/ Bulan		4.765.826.000	-	0	-	0	-
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			L	IP ASN Perangkat Daerah		81	Dinas Sosial	0					
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			L	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		89%	Dinas Sosial	268.258.100					
	1.06.01.2.06.0002	1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		L	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan: TV 3,PC 5, Printer 5, CCTV UPT 4, CCTV kantor dinas 12, speaker wireless 2, meubeler, AC, Perabot kantor, perabot/alat rumah tangga, kursi rapat	12 Paket		96.493.200	-	0	-	0	-
	1.06.01.2.06.0004	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		L	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan makan minum rapat untuk tamu atau rapat	12 Paket		50.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.01.2.06.0005	3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		L	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket		19.906.900	-	0	-	0	-

	1.06.01.2.06.0007	4.	Penyediaan Bahan / Material		L	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jenis ATK yang Disediakan : Kertas, Tinta, Ballpoint dll	12 Paket		50.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.01.2.06.0009	5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		L	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Selama 1 Tahun	12 Laporan		51.858.000	-	0	-	0	-
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			L	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		89%	Dinas Sosial	347.595.840					
	1.06.01.2.08.0002	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Biaya Telepon dan Internet Dinas Sosial, UPT dan Rumah Aman; Biaya Listrik Kantor Dinas Sosial, UPT dan Rumah Aman; dan Biaya Air PAM Dinas Sosial, UPT dan Rumah Aman	12 Laporan		225.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.01.2.08.0004	2.	Penyedeiaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Biaya Tenaga Kerja Pembantu Administrasi Kantor selama 12 Bulan	12 Laporan		122.595.840	-	0	-	0	-

	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			L	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		90%	Dinas Sosial	263.965.450					
	1.06.01.2.09.0002	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		L	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional; dan Penyediaan Biaya Perizinan dan Pajak Kendaraan Dinas / Operasional	13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dari Kemensos)		177.113.200	-	0	-	0	-
	1.06.01.2.09.0010	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Berkala Sarana, Prasarana Perlengkapan / Peralatan Kantor (AC, PC, Laptop, Printer sebanyak 5 Unit)	8 Unit		86.852.250	-	0	-	0	-
		SASARAN : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)				INDIKATOR SASARAN : Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		97,98%	Dinas Sosial	11.615.671.667					
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggara n kesejahteraan sosial		65%	Dinas Sosial	279.000.000					

	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi		72 Orang, 90 Lembaga,	Dinas Sosial	279.000.000					
	1.06.02.2.03.0001	1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota		L	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten / Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) - Pemberian Baju Kerja PSM	54 Orang		5.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.02.2.03.0002	2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota		L	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kabupaten/Kota	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten (TKSK) - Honorarium pelaporan TKSK per 3 Bulan, 4 x selama 1 Tahun	18 Orang		115.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.02.2.03.0004	3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota		L	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kabupaten / Kota	Pembinaan dan Pemberian Bantuan Anak Yatim dalam LKSA (BOP Pembinaan LKSA : Mamin Rapat 2 X per semester, Bantuan Transport); dan Pembinaan Karang Taruna (Operasional Karang Taruna Kabupaten dan Bantuan Karang Taruna Desa)	90 Lembaga		159.000.000	-	0	-	0	-

	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial		45%	Dinas Sosial	1.545.927.967					
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		1.045 Orang	Dinas Sosial	1.380.927.967					
	1.06.04.2.01.0001	1.	Penyediaan Permakanan		L	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemberian permakanan bagi PPKS	820 Orang		616.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.04.2.01.0002	2.	Penyediaan Sandang		L	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemberian sandang bagi PPKS	50 Orang		150.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.04.2.01.0003	3.	Penyediaan Alat Bantu		L	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemberian Alat Bantu bagi PPSK	35 Orang		120.988.867	-	0	-	0	-

	1.06.04.2.01.0004	4.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		L	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal dan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)	15 Orang		5.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.04.2.01.0005	5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		L	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi PPKS	50 Orang		440.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.04.2.01.0006	6.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		L	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemberian Bimbingan Sosial bagi PPKS	10 Orang		5.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.04.2.01.0007	7.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		L	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan	Fasilitasi Pemberian layanan sosial bagi PPKS	15 Orang		5.000.000	-	0	-	0	-

						Kabupaten / Kota									
	1.06.04.2.01.0008	8.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		L	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	Fasilitasi Pemberian layanan dasar dan kesehatan bagi PPKS	15 Orang		5.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.04.2.01.0009	9.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		L	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemberian layanan data dan pengaduan bagi PPKS	15 Orang		5.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.04.2.01.0010	10.	Pemberian Layanan Kedaruratan		L	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	Fasilitasi Pemberian layanan kedaruratan bagi PPKS	20 Orang		28.939.100	-	0	-	0	-
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		188 Orang	Dinas Sosial	165.000.000					

	1.06.04.2.02.0003	1.	Penyediaan Permakanan		L	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemberian Bantuan Permakanan kepada Eks penderita kusta di Sumberglagah	188 Orang		165.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		55%	Dinas Sosial	9.675.743.700					
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah data fakir miskin yang dikelola		222.430 Keluarga, 20 Orang	Dinas Sosial	9.675.743.700					

	1.06.05.2.02.0002	1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		L	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	Updating DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial); Updating Data PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS dan KISDA; Updating PPKS dan PSKS PPKS Terdiri dari 26 Item Jenis (Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial)diantaranya Anak Jalanan, Penyandang Disabilitas, Orang Tua Terlantar Dll)(Pembuatan Aplikasi By Name By Address Geo Taging)	215.000 Keluarga		120.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.05.2.02.0003	2.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		L	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Program Sembako (BPNT)	7.430 Keluarga	DBHCHT	9.505.743.700	-	0	-	0	-
	1.06.05.2.02.0004	3.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		L	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	20 Orang		50.000.000	-	0	-	0	-

	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial		50%	Dinas Sosial	105.000.000					
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		1.000 Orang	Dinas Sosial	85.000.000					
	1.06.06.2.01.0001	1.	Penyediaan Makanan		L	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	Penyediaan Dapur Umum saat Tanggap Darurat Bencana	500 Orang		75.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.06.2.01.0002	2.	Penyediaan Sandang		L	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	Penyediaan sandang bagi korban bencana alam dan sosial	250 Orang		5.000.000	-	0	-	0	-

	1.06.06.2.01.0005	3.	Pelayanan Dukungan Psikososial		L	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan sosial	250 Orang		5.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	46 Orang	Dinas Sosial	20.000.000					

	1.06.06.2.02.0002	1.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		L	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan Pemantapan Tagana dalam Kesiap Siagaan Bencana (Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dalam Tanggap Darurat Bencana)	46 Orang		20.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola		100%	Dinas Sosial	10.000.000					

	1.06.07.2.01	Pemeiliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	6 Makam	Dinas Sosial	10.000.000					
	1.06.07.2.01.0002	1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		L	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	6 Makam		10.000.000	-	0	-	0	-
JUMLAH										17.279.617.057	-	0	-	0	-

Sumber Data SIPD Dinas Sosial

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN PAGU SEMENTARA SEBAGAIMANA PADA APLIKASI SIPD
KABUPATEN MOJOKERTO

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									FORMULIR DPA-BELANJA SKPD							
KAB. MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2025																
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2025																
SKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL																
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																
Uraian	Bidang	Uraian	Program	Kegiatan	Sub	Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
										T- 1	Tahun					T+1
											Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL											Rp17.201.391.057,00	Rp78.226.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.279.617.057,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					Rp17.201.391.057,00	Rp78.226.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.279.617.057,00	
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					Rp17.201.391.057,00	Rp78.226.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.279.617.057,00	
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp5.585.719.390,00	Rp78.226.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.663.945.390,00	
1	06	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp18.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.300.000,00	
1	06	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.025.000,00	
1	06	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.275.000,00	
1	06	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Rp4.765.826.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.765.826.000,00	
1	06	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.765.826.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.765.826.000,00	
1	06	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah					Rp190.032.100,00	Rp78.226.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp268.258.100,00	
1	06	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.267.200,00	Rp78.226.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.493.200,00	
1	06	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
1	06	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp19.906.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.906.900,00	
1	06	01	2.06	0007		Penyediaan Bahan/Material			Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	

1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp51.858.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.858.000,00	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp347.595.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp347.595.840,00	

	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp225.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.000.000,00	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp122.595.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.595.840,00	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp263.965.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp263.965.450,00	
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp177.113.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.113.200,00	
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp86.852.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.852.250,00	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Rp279.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp279.000.000,00	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				Rp279.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp279.000.000,00	
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp115.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.000.000,00	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp159.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.000.000,00	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Rp1.545.927.967,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.545.927.967,00	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				Rp1.380.927.967,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.380.927.967,00	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp616.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp616.000.000,00	
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp120.988.867,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.988.867,00	
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp440.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp440.000.000,00	

1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.939.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.939.100,00	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				Rp165.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.000.000,00	
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp165.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.000.000,00	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Rp9.675.743.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.675.743.700,00	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Rp9.675.743.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.675.743.700,00	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.505.743.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.505.743.700,00	
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				Rp105.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.000.000,00	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				Rp85.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.000.000,00	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000.000,00	
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	

1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Mojokerto, Tanggal 30 Desember 2024 KEPALA DINAS SOSIAL TRY RAHARJO MURDIANTO, S.STP, MAP NIP. 198705192006021002 Mengesahkan, PPKD M. IWAN ABDILLAH, SH, S.Sos, M.Si NIP. 197802232002121004	
Januari		Rp540.207.580,00		
Februari		Rp582.987.350,00		
Maret		Rp1.599.752.913,00		
April		Rp608.090.638,00		
Mei		Rp547.916.038,00		
Juni		Rp1.270.575.793,00		
Juli		Rp9.591.508.038,00		
Agustus		Rp544.208.638,00		
September		Rp623.953.388,00		
Oktober		Rp483.263.088,00		
November		Rp491.887.268,00		
Desember		Rp395.266.325,00		
Jumlah		Rp17.279.617.057,00		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si.	196803271988091002	KETUA	
2.	Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si.	196606181990031011	WAKIL KETUA	
3.	M. IWAN ABDILLAH, SH, S.Sos, M.Si	197802232002121004	SEKRETARIS	
4.	BAMBANG PURWANTO, SH, MH.	196905211996021001	ANGGOTA	
5.	NURUL ISTIQOMAH, SE, MM.	197111161997032004	ANGGOTA	
6.	Drs. SISWADI, MM.	196608101987011002	ANGGOTA	
7.	Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si.	197009271991011002	ANGGOTA	
8.	BENY WINARNO, SH, MH.	198211182010011009	ANGGOTA	

9.	YURDIANSYAH, ST.	198310182010011008	ANGGOTA	
10.	Dra. HEVI MAIDA LAILY, M.Si.	197005281994032003	ANGGOTA	
11.	YUNI LAILI FAIZAH, ST.	197706072001122005	ANGGOTA	

*) Sesuai periodisasi SPD

**Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
(Mendukung Kinerja Utama)**

Tujuan			Sasaran Strategis			Program			Kegiatan				Sub kegiatan				
Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator Sasarn	Target	Uraian	Indikator Program	Target 2025		Uraian	Indikator Kegiatan	Target 2025		Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target 2025	
								Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran
Menurunnnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	9,37	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar	92	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyenggaraan kesejahteraan sosial	65	279.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi	72 Orang, 90 Lembar	279.000.000	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Orang	5.000.000
														2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitas Kew	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitas Kew	18 Orang	115.000.000

														gan Kab upa ten /Ko ta	enan gan Kab u pate n/Ko ta		
														3. Pen ing kat an Ke ma mp uan Pot ens i Su mb er Kes eja hte raa n Sosi al Kel em bag aan Ma sya rak at Ke we nan gan Kab upa ten /Ko ta	Juml ah Lem baga Kesej ahter aan Sosia l yang Meni ngka t Kapa sitas nya Kew enan gan Kab u pate n/ Kota	90 Le m ba ga	159. 000. 000
						Prog ram Perli ndu nga n Dan Jami nan Sosi al	Pers enta se PPKS pene rima manf aat Prog ram Perli ndun gan dan Jami nan Sosia l	5 5	9.67 5.74 3.70 0	Penge lolaan Data Fakir Miski n Cakup an Daera h Kabup aten/ Kota	Juml ah data fakir misk in yang dikel ola	22 2. 43 0 Ke lu ar ga , 20 Or an g	9.67 5.74 3.70 0	1. Pe ng elo laa n Da ta Fak ir Miski n Ca ku pa n Da era h Ka bu pat en/ Kot a	Juml ah Kelu arga yang Men dapa tkan Peng enta san Fakir Miski n Kab u pate n/Ko ta	21 5. 00 0 Ke lu ar ga	120. 000. 000
														2. Fas ilit asi Ba nt ua n So sial Ke	Juml ah Kelu arga Pene rima Manf aat (KPM)	7. 43 0 Ke lu ar ga	9.50 5.74 3.70 0

														sej ah ter aa n Kel ua rga	yang Men dapa tkan Bant uan Sosia l Kesej ahter aan Kelu arga Kew enan gan Kabu pate n / Kota		
														3. Fas ilit asi Ba ntu an Pe ng em ba ng an Eko no mi Ma sya rak at	Juml ah Oran g yang Men dapa tkan Bant uan Peng emb anga n Ekon omi Masy arak at Kew enan gan Kabu pate n / Kota	20 Or an g	50.0 00.0 00
						Prog ram Pen ang ana n Ben cana	Pers enta se korb an benc ana alam dan sosia l yang men dapa t perli ndun gan sosia l	5 0	105. 000. 000	1. Per lin du ng an So sial Ko rba n Be nc an a Ala m da n So sial Ka bu pat en /K ota	Juml ah perli ndu ngan sosia l korb an Benc ana Ala m dan Sosi al Kabu pate n/Ko ta	1. 00 0 Or an g	85.0 00.0 00	1. Penye diaan Maka nan	Juml ah Oran g yang Men dapa tkan Perm akan an 3x1 Hari dala m Masa Tang gap Daru rat (Peng ungsi an) Kew enan	50 0 Or an g	75.0 00.0 00

															gan Kabu pate n/Ko ta		
													2. Pe nye dia an San da ng	Juml ah Oran g yang Men dapa tkan Pakai an dan Kele ngka pan Lainy a yang Ters edia Pada Masa Tang gap Daru rat (Pen gung sian) dan Pasc a Benc ana Kew enan gan Kabu pate n / Kota	25 0 Or an g	5.00 0.00 0	
													3. Pel aya na n Du ku ng an Psi kos osi al	Juml ah Korb an Benc ana yang Men dapa tkan Laya nan Duku ngan Psiko sosia l Kew enan gan Kabu pate n/ Kota	25 0 Or an g	5.00 0.00 0	
									2. Pe ny el en gg ar	Juml ah Oran g yang Mela	46 Or an g	20.0 00.0 00	Koord inasi, Sosial isasi dan Pelak	Juml ah Oran g yang Mela	46 Or an g	20.0 00.0 00	

										aa n Pe m be rd ay aa n M as ya ra ka t ter ha da p Ke sia psi ag aa n Be nc an a Ka bu pa te n/ Ko ta	ksan akan Koor dina si, Sosi alisa si dan Pela ksan aan Taru na Siag a Benc ana			sanaa n Tarun a Siaga Benca na	ksan akan Koor dinas i, Sosia lisasi dan Pelak sana an Taru na Siaga Benc ana Kew enan gan Kabu pate n/ Kota		
						Prog ram Reh abili tasi Sosi al	Pers enta se PPKS pene rima manf aat Prog ram Reha bilita si Sosia l	4 5	1.54 5.92 7.96 7	1. Re ha bil ita si So si al D as ar Pe ny an da ng Di sa bil ita s Te rla nt ar , A na k Te rla nt ar , La nj ut Us ia Te rla nt ar ,	Juml ah Peny anda ng Disa bilita s Terla ntar, Anak Terla ntar, Lanj ut Usia Terla ntar, serta Gela ndan gan Peng emis di Luar Pant i Sosi al yang dire habil itasi	1. 04 5 Or an g	1.38 0.92 7.96 7	1. Penye diaan Perm akana n	Juml ah Oran g yang Men dapa tkan Pem enuh an Kebu tuha n Perm akan an Sesu ai deng an Stan dar Gizi Mini mal Kew enan gan Kabu pate n/ Kota	82 0 Or an g	616. 000. 000

										se rt a G el an da ng an Pe ng e mi s di Lu ar Pa nt i So si al							
														2. Pe ny edi an Sa nd an g	Juml ah Oran g yang Men erim a Pakai an dan Kele ngka pan Lainn ya yang Ters edia dala m 1 Tahu n Kew enan gan Kabu pate n / Kota	50 Or an g	150. 000. 000
														3. Pe ny edi aa n Ala t Ba nt u	Juml ah Oran g yang Men dapa tkan Alat Bant u dan Alat Bant u Pera ga Sesu ai kebu tuha n	35 Or an g	120. 988. 867

															an da ng Di sa bili tas Te rla nt ar, An ak Te rla nt ar, La nj ut Us ia Te rla nt ar, se rta Ge la nd an ga n Pe ng e mi s da n M as ya ra ka t	Terla ntar, Lanju t Usia Terla ntar, serta Gela ndan gan Peng emis dan Masy arak at Kew enan gan Kabu pate n/Ko ta		
															7. Fa sili tas Pe m bu at an No m or In du k Ke pe nd ud uk an , Ak ta Ke la hir an , Su rat Ni ka	Juml ah Oran g yang Terp enuh i Kebu tuha n Pem buat an Nom or Indu k Kepe ndud ukan , Akta Kela hiran , Surat Nika h, dan Kartu Ident	15 Or an g	5.00 0.00 0

															h, da n Ka rtu Id en tit as An ak	itas Anak bagi Peny anda ng Disa bilita s Kew enan gan Kabu pate n / Kota		
															8. Pe m be ria n Ak se s ke La ya na n Pe nd idi ka n da n Ke se ha ta n Da sar	Juml ah Oran g yang Men dapa tkan Akse s ke Laya nan Pend idika n dan Kese hata n Dasa r Kew enan gan Kabu pate n / Kota	15 Or an g	5.00 0.00 0
															9. Pe m be ria n La ya na n Da ta da n Pe ng ad ua n	Juml ah Oran g yang Men dapa tkan Laya nan Data dan Peng adua n Kew enan gan Kabu pate n/Ko ta	15 Or an g	5.00 0.00 0
															10. Pe mb eri an La ya na n Ke da rur	Juml ah Oran g yang Men dapa tkan Pelay anan Keda	20 Or an g	28.9 39.1 00

													ata n	rurat an Kew enan gan Kabu pate n/Ko ta			
									2. Re ha bili tas i So sia l Pe ny an da ng M as ala h Ke sej ah ter aa n So sia l (P M KS) Lai nn ya Bu ka n Ko rb an HI V/ AI DS da n NA PZ A di Lu ar Pa nti So sia l	Juml ah Peny anda ng Mas alah Kese jahte raan Sosi al (PM KS) Lain nya Buka n Korb an HIV/ AIDS dan NAP ZA di Luar Pant i Sosi al yang dire habil itasi	18 8 Or an g	165. 000. 000	1. Penye diaan Perm akana n	Juml ah Oran g yang Men dapa tkan Pem enuh an Kebu tuha n Perm akan an Sesu ai deng an Stan dar Gizi Mini mal Kew enan gan Kabu pate n/Ko ta	18 8 Or an g	165. 000. 000	
						Prog ram Pen gelo laan Tama n Mak am Pahl awa	Pers enta se Juml ah Tama n Mak am Pahl awa	1 0 0	10.0 00.0 00	Pemel iharaa n Tama n Maka m Pahla wan Nasio nal	Juml ah Mak am yang Terp enuh i Pem eliha raan	6 M ak a m	10.0 00.0 00	Peme lihara an Tama n Maka m Pahla wan Nasio nal	Juml ah Tama n Mak am yang Terp enuh i Pem	6 M ak a m	10.0 00.0 00

						n	n yang Dikel ola			Kabup aten / Kota	pada Tam an Mak am Pahl awa n Kabu pate n / Kota			Kabu paten / Kota	eliha raan nya pada Tam an Mak am Pahl awan Kabu pate n/ Kota		
--	--	--	--	--	--	---	---------------------------	--	--	-------------------------	---	--	--	-------------------------	--	--	--

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
(Mendukung Kinerja Lainnya)

Tujuan			Kinerja Lainnya			Program			Kegiatan				Sub kegiatan				
Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target 2025		Uraian	Indikator Kegiatan	Target 2025		Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target 2025	
								Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran
			1. Meningkatkan gk at n ya Ta ta ke lo la Bi ro kr as i P e m er in ta h a n ya n g ef ek tif , ef isi e n d a n ak u nt a b el	Nilai SAKIP Dina s Sosi al	81,05	Program Penu njan g Urus an Pem erint ahan Daer ah Kabu pate n/Ko ta	Persen tas e Ind ika tor Pro gra m Per an gka t Da era h ya ng ter cap ai	90	5.663.945.390	1. Pener enta se Indi c a n a a n, P e n g a n g t e r c a p a i n E v a l u a s i K i n e r j a P e r a n g k a t D a e r a h	Pers enta se Indi kato r Pro gra m Pera ngk at Dae rah yan g t e r c a p a i s e s u a i t a r g e t	90	18.300.000	1. Peny us un an do ku me n Pe re nc an aa n Pe ra ng kat Da er ah	Jumlah Dokum en Perenc anaan Pera ng kat Daerah	9Dok um en	9.025.000
				Pers enta se Reali sasi Ang gara n Pera ngka t Daer ah	97									2. Ev alu asi Kin erj a Pe ra ng kat Da er ah	Jumlah Lapora n Evaluas i Kinerja Pera ng kat Daerah	10Lap ora n	9.275.000
				Indeks Prof	82					2. Ad m	Pers enta se	97	4.765.826.00	1. Pen yed iaa	Jumlah Orang yang	12Ora ng/	4.765.826.00

				esio nalit as ASN						i n is tr a si K e u a n g a n P e r a n g k a t D a e r a h	Real isasi Ang gara n Pera ngk at Dae rah		0	an Gaj i dan Tun jan gan AS N	Meneri ma Gaji dan Tunjan gan ASN	Bul an	0
			2. O pt i m al is a si k u al it a s p el a y a n a n m el al ui p e m b a n g u n a n in o v a si y a n g m e m p	Juml ah Inov asi Yang Teri nter nalis asi dan Ters osial isasi sert a Berk elanj utan	1					3. A d m i n is tr a si U m u m P e r a n g k a t D a e r a h	Pers enta se Pen yedi aan Ad mini stra si Um um Pera ngk at Dae rah Ses uai Keb utu han	8 9	268. 258. 100	1. Pen yed iaa n Per alat an dan Per len gka pan Kan tor	Jumlah Paket Peralat an dan Perleng kapan Kantor yang Disedia kan	12 Pak et	96.4 93.2 00

										a h P e n u n j a n g U r u s a n P e m e r i n t a h D a e r a h				da n Per izin an Ke nd ara an Din as Op era sio nal ata u Lap ang an			
														2. Pe me lih ara an / Re ha bili tas i Sar an a da n Pra sar an a Ge du ng Ka nt or ata u Ba ng un an Lai nn ya	Jumlah Sarana dan Prasara na Gedun g Kantor atau Bangun an Lainnya yang Dipelih ara/Dir ehabilit asi	8 Uni t	86.8 52.2 50

Sumber Data Dinas Sosial

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program, kegiatan dan sub. kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan/sub. kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub. kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Dinas Sosial, agar program/kegiatan/sub. kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat Desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan / mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Di dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sudah sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan dipundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun 2026 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO



TRY RAHARJO MURDIANTO, S.STP., M.AP.
Pembina
NIP 198705192006021002